

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 telah selesai disusun.

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara ini berisi tentang Prioritas Program dan Indikasi Kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Penajam, Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KAB. PPU



Mawar, ST, MM
Pembina Tk. I/ IV.b
Nip. 19661231 199803 2 020

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistimatika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
	3.3 Program dan Kegiatan (dilengkapi matriks rencana program dan Kegiatan SKPD tahun 2024 dan prakiraan maju 2025	25
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V	PENUTUP	58



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Propinsi Km.9 Nipah-Nipah Telp. 0542- 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 800 / 54 /Dukcapil/VIII/2023

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan Persiapan Penyusunan Yang dimulai dengan penyusunan rencana keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan renstra perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusunan Rencana Strategi (Renstar) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024-2026 .
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 2. Menghimpun, memilah dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
 4. Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 5. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Tanggal 30 Januari 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Penajam Paser Utara
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas,

MAWAR, ST. MM.
Pembina Tk. I
Nip. 196612311998032020

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2024-2026

1.	1. Kepala Dinas	Ketua
	2. Kasubag. Program dan Perencanaan	Sekretaris
	3. Kepala Bidang Dafduk	Anggota
	4. Kepala Bidang Capil	Anggota
	5. Kepala Bidang PIAK	Anggota
	6. Kepala Bidang PDIP	Anggota
	7. Kamendana / JFT. ADB	Anggota
	8. Mawar Warsiah /JFT. ADB	Anggota
	9. Kasubag Umum	Anggota
	10. Heny Puspa Sari, SE./ Analis	Anggota
	11. Yusia Nonik, S. Kom.Musdalifah	Anggota
	12. Musdalifah.	Anggota
	13. Triyanti.	Anggota

Pir. Kepala Dinas,

MAWAR, ST. MM.
Pembina Tk. I
Nip. 196612311998032020

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja. Penyusunan Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif. Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah 1 (satu) tahun ke depan. Renja Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen

resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterkaitan antara Renstra dan Renja adalah Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27 tahun 2017 tentang susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2024 ini disusun untuk menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan

kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 yang diharapkan adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil;
 - b. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir (real time)

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan (dilengkapi matriks rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2024 dan prakiraan maju 2025)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Pelaksanaan Program
Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2022

N0.	Nama Program	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Penjelasan
1	2	3	4	6	7	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.811.779.309	5.392.359.549	419.419.760	92.78	
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.493.137.925	3.147.849.268	345.288.657	90.12	Capaian Tinggi Alasan: Gaji, Gaji 13, Gaji 14 dan TPP terealisasi
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.540.000	51.510.000	30.000	99.94	Capaian Sangat Tinggi Alasan: Terealisasinya Honor PA, PPTK, PPK, Bendahara, Bendahara Pembantu, Bendahara, Barang dan Pejabat Pengadaan selama 12 bulan
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.859.490	1.847.975	11.515	99.38	Capaian Sangat Tinggi Alasan: Terealisasinya belanja komponen instalasi penerangan kantor
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.782.562	91.450.000	332.562	99.64	Capaian Sangat Tinggi Alasan: Terealisasinya belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	5.885.300	114.700	98.09	Capaian Sangat Tinggi Alasan: Terealisasinya cetakan dan fotocopy selama 1 tahun
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.019.527	295.875.024	144.503	99.95	Capaian Sangat Tinggi Alasan: Terealisasinya perjalanan dinas, koordinasi dan konsultasi
C	Kegiatan					

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	435.666.867	415.886.050	19.780.817	95.46	Capaian Sangat Tinggi Alasan : Terealisasi penyediaan jasa surat menyurat, pembelian materai, makan minum rapat
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.215.500	20.234.728	2.980.772	87.16	Capaian Tinggi Alasan: Terealisasi internet selama 1 tahun
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.271.000.000	1.265.000.000	6.000.0000	99.53	Capaian Sangat Tinggi Alasan: Terbayarkan gaji THL selama 12 bulan
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.607.438	73.587.454	43.019.984	63.11	Capaian Sedang Alasan: Terealisasi BBM Pelayanan Keliling, STNK Kendaraan Dinas. Untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin tidak terealisasi banyak disebabkan tidak banyaknya kendaraan dinas yang memerlukan perawatan kendaraan dinas
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.950.000	23.233.750	1.716.250	93.12	Capaian Sangat Tinggi Alasan : Terealisasinya pemeliharaan Notebook, Komputer, dan Printer kantor selama 1 tahun
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
A	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	37.500.000	37.447.100	52.900	99.86	Capaian Sangat Tinggi Alasan: Terealisasinya kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari ATK dan biaya perjalanan dinas
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					

A	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil					
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	41.700.000	36.870.200	4.829.800	88.42	Capaian Tinggi Alasan : Terealisasi kegiatan pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting yang terdiri dari ATK, dan tidak terealisasinya uang lembur
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
A	Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan					
1	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	37.500.000	27.341.100	10.158.900	72.91	Capaian Rendah Alasan: Terealisasinya kegiatan Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan berupa ATK dan Cetak Buku Profi, Tidak terealisasinya perjalanan dinas disebabkan terkendalanya waktu
B	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
1	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	101.790.000	99.540.000	2.250.000	97.79	Capaian Sangat Tinggi Alasan: Terealisasinya Belanja Modal Komputer
2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	37.500.000	37.496.000	4.000	99.99	Capaian Sangat Tinggi Alasan : Teralisasinya kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan berupa ATK
		6.067.769.309	5.631.053.949	436.715.360	92.80	

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								
2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan tertib administrasi keuangan daerah/ dukcapil								
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	28 Bulan	42 Bulan	42 Bulan	100 %	56 Bulan	126 Bulan	90 %
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100 %	48 Bulan	108 Bulan	90 %
2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi									

	Umum Perangkat daerah									
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100%	48 Bulan	108 Bulan	90%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	28 Unit	76 Unit	190%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	6.000 Lembar	12.000 Lembar	18.000 Lembar	18.000 Lembar	100%	24.000 Lembar	54.000 Lembar	90 %
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Disdukcapil	30 Kegiatan	97 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	100%	94 Kegiatan	236 Kegiatan	78.7%
2.12.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	6 Laporan	12 laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	18 Laporan	46 Laporan	76.7%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100 %	48 Bulan	108 Bulan	90 %
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum bagi masyarakat	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100 %	48 Bulan	108 Bulan	90 %
2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan dinas dukcapil	16 Unit	24 Unit	16 Unit	16 Unit	100%	35 Unit	80 Unit	50%

2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	35 Unit	70 Unit	95 Unit	95 Unit	100%	75 Unit	240 Unit	68.6%
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase dokumen kependudukan yang dilayani								
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kelancaran Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan								
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Terbitnya KTP-el, KIA dan dokumen lainnya	10.500 KIA 22.500 KTP-el 15.500 Lembar KK	31.822 KIA 87.755 KTP-el 67.622 Lembar KK	5.597 KIA 12.496 KTP-el 18.411 Lembar KK	5.597 KIA 12.496 KTP-el 18.411 Lembar KK	100%	55.581 KIA 19.753 KTP-el 132.742 Lembar KK	93.000 KIA 80.498 KTP-el 218.757 Lembar KK	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Penerbitan dokumen pencatatan sipil								
2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Tertib dokumentasi pencatatan sipil								
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Dokumentasi akta pencatatan sipil	1.500 Akta	8.751 Akta	7.475 Akta	7.475 Akta	100%	7.834 Akta	24.060 Akta	160.4%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang akurat								

2.12.04.2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Pengelolaan dan pemanfaatan data akurat dan dapat dipertanggung jawabkan								
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya data penduduk yang mutakhir	4.777 jiwa	-	-	-	-	4.777 jiwa	9.554 jiwa	100%
2.12.04.2.02	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Tersedianya data penduduk yang valid dan mutakhir untuk perencanaan								
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terakhir Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan	Tersedianya data penduduk melalui SIAK	1 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan terupdate dan dimanfaatkan oleh Lembaga pengguna	20.000 NIK	30.000 NIK	45.000 NIK	45.000 NIK	100%	71.100 NIK	146.100 NIK	73.1%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 20018-2023. Adapun indikator kinerja tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023.

Pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi ketertiban administrasi kependudukan, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sudah lebih tertib dan baik hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja utama sebagai berikut;

- a. Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Keluarga ;
- b. Jumlah kepemilikan dokumen kependuduk KTP-el ;
- c. Jumlah Kepemilikan dokumen KIA (Kartu Identitas Anak);
- d. Jumlah Kepemilikan dokumen Akta Kelahiran.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disdukcapil
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Keluarga			18.000	18.500	19.000	100%	59.995	62.256	63.226	100%	
b	Jumlah kepemilikan dokumen kependuduk KTP-el			22.000	22.500	24.000	100%	126.328	130.409	133.790	100%	
c	Jumlah Kepemilikan dokumen KIA (Kartu Identitas Anak)			10.000	10.500	10.750	100%	42.759	37.953	38.179	100%	
d	Jumlah Kepemilikan dokumen Akta Kelahiran			6.810	5.623	5.235	100%	128.141	135.207	137.082	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD antara lain belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan.

Adapun Tantangan yang harus dihadapi Dinas Dukcapil yaitu :

- a. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.
- b. Minimnya kemampuan penguasaan teknologi informasi personil pelayanan.
- c. Anggapan bahwa administrasi kependudukan dilihat sebagai sumber pemasukan/pendapatan daerah, bukan sebagai pelayanan publik.
- d. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.
- e. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman.

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan antara lain :

- a. Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum.
- b. Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- c. Adanya pemegang kepentingan (stake holder) yang mewajibkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit dan SKPD atau lembaga lainnya.
- d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung keakuratan, kemutakhiran dan validasi data kependudukan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada rancangan awal Rencana kerja 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusukan anggaran sebesar Rp. 6.981.238.892,- (enam milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah). Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagai berikut :

Tabel T-C.31
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
 Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Lokasi	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87%	6.366.051.017		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87%	6.366.051.017		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	50.000.000		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	50.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	50.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	50.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
2	Administrasi Keu Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	3.992.422.134		Administrasi Keu Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	3.992.422.134		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 OB	3.883.822.134	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 OB	3.883.822.134	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	108.600.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	108.600.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	659.964.873		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	659.964.873		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	5 paket	1.859.490	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	5 paket	1.859.490	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	126.563.716	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	126.563.716	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	3.100.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	3.100.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	528.441.667	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	528.441.667	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Persen	1.471.932.010		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Persen	1.471.932.010		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	201.096.010	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	201.096.010	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	30.636.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	30.636.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	1.240.200.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	1.240.200.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Persen	191.732.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Persen	191.732.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	17 unit	167.012.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	17 unit	167.012.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	36 Unit	24.720.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	36 Unit	24.720.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
B	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100%	247.500.000		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100%	247.500.000		
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100 persen	180.000.000		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100 persen	180.000.000		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	3 Dokumen	180.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	3 Dokumen	180.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	

		Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100 Persen	67.500.000		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100 Persen	67.500.000		
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	1 dokumen	67.500.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	1 dokumen	67.500.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
C	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100%	15.000.000		Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100%	15.000.000		
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 Persen	15.000.000		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 Persen	15.000.000		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	2 Dokumen	15.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	2 Dokumen	15.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	

		Peristiwa Penting					Peristiwa Penting				
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100%	343.312.875		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100%	343.312.875		
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen	118.312.875		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen	118.312.875		
	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	3 laporan	118.312.875	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	3 laporan	118.312.875	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	
2	Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen	150.000.000		Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen	150.000.000		
	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi	54 dokumen	150.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi	54 dokumen	150.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	

		administrasi kependudukan					administrasi kependudukan				
3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 persen	50.000.000		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 persen	50.000.000		
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 dokumen	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 dokumen	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 laporan	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 laporan	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	
4	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen	25.000.000		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen	25.000.000		
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	

<i>E</i>	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>9.375.000</i>		<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>9.375.000</i>		
1	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang tersusun	1 dokumen	9.375.000		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang tersusun	1 dokumen	9.375.000		
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	2 dokumen	9.375.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	2 dokumen	9.375.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
		NIHIL			

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat realisasi kinerja yang mengacu pada Standar Nasional / Lainnya.

Dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat disandingkan dengan Standar Nasional / lainnya, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan bukan melaksanakan Urusan Wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun Standar Nasional Lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam jangkauan 1 (satu) tahun ke depan. Adapun Tujuan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan Renja Perangkat Daerah adalah **Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik**. Dimana perangkat daerah memberikan upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sasaran Renja Perangkat Daerah adalah penjabaran dari tujuan yaitu segala sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tahunan. Adapun sasaran perangkat daerah adalah **Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dengan dukungan Teknologi Informasi**. Sasaran perangkat daerah akan digambarkan melalui Indikator dan Target yang tercakup dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 akan melaksanakan Program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung dengan melakukan INOVASI percepatan pencapaian pelayanan dengan melaksanakan Jemput Bola. Jenis layanan

Jemput Bola “ Paling Asik Duduk Diteras” Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan Terintegrasi terdiri dari :

1. Perubahan Data Kartu Keluarga
2. KTP-el
3. Kartu Identitas Anak (KIA)
4. SKPWNI
5. Akta Kelahiran
6. Akta Kematian
7. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Selain Pelayanan tersebut diatas kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara akan melaksanakan pelayanan berbasis online. Jenis Pelayanan Online “ Penajam Serambi IKN “ PELAYANAN dengan Jari seluruh dokumen Adminduk bisa cetak sendiri.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 tergambar dalam tabel:

Tabel T.C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.981.238.892					8.068.000.000
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			6.981.238.892					8.068.000.000
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			6.981.238.892					8.068.000.000
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87%	6.366.051.017				91%	7.043.000.000
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	50.000.000				91 Persen	50.000.000
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	50.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		14 dokumen	50.000.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keu Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	3.992.422.134				91 Persen	4.120.000.000
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan	336 OB	3.883.822.134	Kab.PPU, Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana bagi		336 OB	4.000.000.000

		Tunjangan ASN			Kel/Desa	hasil			
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	108.600.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		12 Dokumen	120.000.000
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	87 Persen	659.964.873				91 Persen	808.000.000
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Koantor yang disediakan	5 paket	1.859.490	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		6 paket	3.000.000
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	126.563.716	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		6 paket	150.000.000
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	3.100.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		4 paket	5.000.000
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	528.441.667	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		14 laporan	650.000.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Persen	1.471.932.010				91 Persen	1.785.000.000
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	201.096.010	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		9 laporan	450.000.000
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	30.636.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		12 laporan	35.000.000
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	1.240.200.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		12 laporan	1.300.000.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Persen	191.732.000				91 persen	260.000.000
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkna pajaknya	17 unit	167.012.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		18 unit	250.000.000
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharanya	36 Unit	24.720.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		40 Unit	30.000.000
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100%	247.500.000				100%	400.000.000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dan penerbitan dokumen pendfataran penduduk	100 persen	180.000.000				100 persen	250.000.000
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftarab Penduduk								
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan	3 Dokumen	180.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		2 Dokumen	250.000.000

		Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 Persen	67.500.000				100 Persen	150.000.000
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan								
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	1 dokumen	67.500.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		5 dokumen	150.000.000
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100%	15.000.000				100%	75.000.000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 Persen	15.000.000				100 Persen	75.000.000
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2 Dokumen	15.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		12 Dokumen	75.000.000
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100%	343.312.875				100%	525.000.000
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data DKB	100 Persen	118.312.875				100 Persen	150.000.000

2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 laporan	118.312.875	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		2 Laporan	150.000.000
2.12.04.2.02	Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen	150.000.000				100 Persen	200.000.000
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan, tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
		Penyusunan, tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	54 dokumen	150.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		2 dokumen	200.000.000
2.12.01.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 persen	50.000.000				100 persen	125.000.000
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 dokumen	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		2 dokumen	75.000.000
12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 laporan	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		2 laporan	50.000.000

2.12.04.2.04	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen	25.000.000				100 Persen	50.000.000
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan								
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		4 laporan	50.000.000
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang tersusun	1 dokumen	9.375.000				1 dokumen	25.000.000
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang tersusun	1 dokumen	9.375.000				1 dokumen	25.000.000
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya								
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya	2 dokumen	9.375.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil		1 dokumen	25.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah disusun untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan pertimbangan terhadap rencana kinerja dan tercapainya target kinerja dan pendanaan yang dirumuskan dengan tujuan utama.

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mengacu pada RPD 2024-2026 yang dimutakhirkan melalui aplikasi SIPD RI. Beberapa faktor permasalahan yang di hadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran / target dalam menetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penataan Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan ;
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan ;
 - a. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan daerah
2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan;
 - a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Kegiatan Penyelenggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan;
 - a. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan;
 - a. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan;
 - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Uraian pelaksanaan program kegiatan, penyebaran lokasi program kegiatan serta rumusan program kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara
Tahun 2024

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						6.981.238.892							8.068.000.000	
	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						6.981.238.892							8.068.000.000	
	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						6.981.238.892							8.068.000.000	
	2.12.01	Program Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%			87%	6.366.051.017						91%	7.043.000.000	

		Pemerintahan Daerah Kab/ Kota														
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Persen			87 Persen	50.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	91 Persen	50.000.000	Dukcapil
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14 dokumen			7 dokumen	50.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat Kab. PPU	14 dokumen	50.000.000	Dukcapil

											public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi					
	2.12.01.2.02	Administrasi Keu Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Persen			87 Persen	3.992.422.134			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kab. PPU	91 Persen	4.120.000.000	Dukcapil
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	336 OB			336 OB	3.883.822.134	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel	Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kab. PPU	336 OB	4.000.000.000	Dukcapil

												untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
2.12.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	108.600.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kab. PPU	12 Dokumen	120.000.000	Dukcapil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Persen			87 Persen	659.964.873			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Peningkatan tata Kelola pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	91 Persen	808.000.000	Dukcapil

											dan Transformasi Pelayanan Publik	daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	(ASN) Disdukcapil Kab. PPU			
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket			5 paket	1.859.490	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kab. PPU	6 paket	3.000.000	Dukcapil

											informasi					
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket			5 Paket	126.563.716	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kab. PPU	6 paket	150.000.000	Dukcapil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 paket			2 paket	3.100.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public,	Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kab. PPU	4 paket	5.000.000	Dukcapil

												Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 laporan			15 laporan	528.441.667	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kab. PPU	14 laporan	650.000.000	Dukcapil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Persen			87 Persen	1.471.932.010			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk	Aparatur Sipil Negara (ASN) , THL Disdukcapil Kab. PPU	91 Persen	1.785.000.000	Dukcapil

												mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10 laporan			6 laporan	201.096.010	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) , THL Disdukcapil Kab. PPU	9 laporan	450.000.000	Dukcapil
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah laporan penyediaan jasa	12 laporan			12 laporan	30.636.000	Kab.PPU, Kecamatan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan tata Kelola	Aparatur Sipil	12 laporan	35.000.000	Dukcapil

			komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan						Kel/Desa	Umum- Dana bagi hasil	Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Negara (ASN) , THL Disdukcapil Kab. PPU			
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan			12 laporan	1.240.200.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis	Aparatur Sipil Negara (ASN) , THL Disdukcapil Kab. PPU	12 laporan	1.300.000.000	Dukcapil

											teknologi informasi					
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Persen			87 Persen	191.732.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Barang Milik Daerah yang terpakai	91 persen	280.000.000	Dukcapil
2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dipeliharanya dan dibayarkan pajaknya	20 Unit			17 unit	167.012.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public,	Barang Milik Daerah yang terpakai	18 unit	250.000.000	Dukcapil

												Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharanya	42 Unit			36 Unit	24.720.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Barang Milik Daerah yang terpakai	40 Unit	30.000.000	Dukcapil
2	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen dokumen pendaftaran penduduk	100%			100%	247.500.000						100%	400.000.000	
	2.12.02.2.01	Pelayanan	Persentase	100			100	180.000.000			Memperkuat	Peningkatan	Masyarakat	100	250.000.000	Dukcapil

		Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	persen			persen				Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Kab. PPU	persen		
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen			3 Dokumen	180.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan	Masyarakat Kab. PPU	2 Dokumen	250.000.000	Dukcapil

											berbasis teknologi informasi					
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 Persen			100 Persen	67.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	100 Persen	150.000.000	Dukcapil
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Banko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan														
			Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formular, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	5 dokumen			1 dokumen	67.500.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat Kab. PPU	5 dokumen	150.000.000	Dukcapil

												public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
3	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100%			100%	15.000.000						100%	75.000.000	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 Persen			100 Persen	15.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	100 Persen	75.000.000	Dukcapil
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah dokumen hasil Pencatatan,	12 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000	Kab.PPU, Kecamatan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan tata Kelola	Masyarakat Kab. PPU	12 Dokumen	75.000.000	Dukcapil

			Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						Kel/Desa	Umum-Dana bagi hasil	Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
4	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100%			100%	343.312.875						100%	525.000.000	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen			100 Persen	118.312.875			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public,	Masyarakat Kab. PPU	100 Persen	150.000.000	Dukcapil

												Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah														
			Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	2 laporan			3 laporan	118.312.875	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	2 Laporan	150.000.000	Dukcapil
	2.12.04.2.02	Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen			100 Persen	150.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk	Masyarakat Kab. PPU	100 Persen	200.000.000	Dukcapil

												mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi															
			Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	2 dokumen			54 dokumen	150.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	2 dokumen	200.000.000	Dukcapil
2.12.01.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan	100 persen				100 persen	50.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kab. PPU	100 persen	125.000.000	Dukcapil

		Kependudukan	data DKB								Transformasi Pelayanan Publik	professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
			Jumlah dokumen penyelenggaran pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen			5 dokumen	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	2 dokumen	75.000.000	dukcapil
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan														

			Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan			3 laporan	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	2 laporan	50.000.000	dukcapil
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100 Persen			100 Persen	25.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan	Masyarakat Kab. PPU	100 Persen	50.000.000	dukcapil

												berbasis teknologi informasi				
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	4 laporan			2 laporan	25.000.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	4 laporan	50.000.000	dukcapil
	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang tersusun	3 dokumen			1 dokumen	9.375.000						1 dokumen	25.000.000	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang tersusun	3 dokumen			1 dokumen	9.375.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan	Masyarakat Kab. PPU	1 dokumen	25.000.000	dukcapil

											Publik	akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi				
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain															
		Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	1 dokumen			2 dokumen	9.375.000	Kab.PPU, Kecamatan, Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana bagi hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kab. PPU	1 dokumen	25.000.000	dukcapil	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintahan dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Tahunan Dinas Dukcapil yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain menjadi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Kepala Dinas dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

1.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya :

1. Dukungan anggaran yang dilimpahkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas;
2. Tidak dianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Admindak oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Belum adanya kesadaran OPD lingkup Kabupaten untuk melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kewenangan sebagai OPD.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2024 :

1. Bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) untuk pelaporan peristiwa kematian yang dilaporkan sehingga bisa langsung diterbitkan akta kematian dengan buku pokok pemakaman
2. Membuka layanan online untuk memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh
3. Jemput bola perekaman di sekolah tingkat SLTA untuk pencapaian tingkat perekaman
4. Melaksanakan percepatan program Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Rencana tingkat lanjut yang akan dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 dengan melakukan kegiatan pelayanan dan terus berbenah baik dalam hal pelayanan maupun dalam penyederhanaan prosedur/ birokrasi. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas serta usulan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2024 untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penajam, Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas,



M. A. W. A. R. S. T. M. M.

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 196612311998032020